

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI (BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI
Dengan	: 1. Dirjen PPTKLN Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI; 2. Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI; dan 3. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI.
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 30 Januari 2007
Waktu	: Pukul 14. ³⁰ – 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	Dr. Ribka Tjiptaning / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Surjadi / Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Acara	: Membicarakan masalah TKI di Luar Negeri
Anggota yang hadir	: 33 Anggota dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI, 14 orang Ijin.

Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR-RI dengan Dirjen PPTKLN Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI. pukul 14.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. RDP didahului dengan pengantar Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan paparan/jawaban Dirjen PPTKLN Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI atas pertanyaan dan tanggapan Komisi IX DPR RI.

KESIMPULAN / KEPUTUSAN

Setelah mendengarkan berbagai usul/saran/tanggapan para Anggota Komisi IX DPR RI, maka sebelum rapat ditutup, Ketua Rapat menyampaikan dan membacakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Komisi IX DPR RI mendorong Direktorat Jenderal P2TKLN DEPNAKERTRANS R.I, Direktorat Jenderal Imigrasi DEPKUMHAM R.I, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional DEPLU R.I. dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler DEPLU R.I. untuk mengintensifkan kerja sama dan koordinasi dalam menangani permasalahan pengiriman TKI ke luar negeri.

2. Komisi IX DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi DEPKUMHAM R.I. dan Direktorat Jenderal P2TKLN DEPNAKERTRANS R.I. agar lebih selektif dalam meneliti dokumen identitas pembuatan pasport untuk mencegah pemalsuan dokumen jati diri CTKI, terutama mengenai umur.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi DEPKUMHAM R.I. dan Direktorat Jenderal P2TKLN DEPNAKERTRANS R.I. untuk meningkatkan upaya pemberantasan calo dan pemungutan biaya tidak resmi dalam proses pembuatan paspor bagi TKI.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional DEPLU R.I. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler DEPLU R.I. untuk meningkatkan program perlindungan TKI di seluruh negara penempatan dan mengkoordinasikan progress permasalahan hasil evaluasi TKI kepada Komisi IX DPR RI
5. Komisi IX DPR RI mendorong Dirjen P2TKLN DEPNAKERTRANS R.I. dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional DEPLU R.I. untuk melakukan upaya tindak lanjut untuk memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja secara tidak resmi di Macau dan Malaysia serta negara tujuan lainnya.

Rapat ditutup pukul 17.15 WIB.

Jakarta, 30 Januari 2007

Pemerintah
Dirjen PPTKLN Depnakertrans RI,

Pimpinan Komisi IX DPR-RI
Ketua,

I Gusti Made Arke

Dr. Ribka Tjjiptaning

Pemerintah
Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional
Deplu RI,

Pemerintah
Dirjen Imigrasi Depkumham RI,

Edi Pratomo

Drs. Basyir Ahmad Barmawi

Draft Kesimpulan
Rapat Dengar Pendapat dengan
Dirjen PPTKLN Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI; dan
Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI.
Tanggal, 30 Januari 2007

6. Komisi IX DPR RI mendorong Direktorat Jenderal P2TKLN DEPNAKERTRANS, Direktorat Jenderal Imigrasi DEPKUMHAM, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional DEPLU untuk mengintensifkan kerja sama dan koordinasi dalam menangani permasalahan pengiriman TKI ke luar negeri.
7. Komisi IX DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi DEPKUMHAM agar lebih selektif dalam meneliti dokumen identitas pembuatan pasport untuk mencegah pemalasan dokumen jati diri CTKI, terutama mengenai umur.
8. Komisi IX DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi DEPKUMHAM untuk meningkatkan upaya pemberantasan calo dan pungutan biaya tidak resmi dalam proses pembuatan paspor bagi TKI.
9. Komisi IX DPR RI mendesak Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional DEPLU untuk meningkatkan program perlindungan TKI di seluruh negara penempatan dan mengkoordinasikan progress permasalahan hasil evaluasi TKI kepada Komisi IX DPR RI
10. Komisi IX DPR RI mendorong Dirjen P2TKLN DEPNAKERTRANS dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional DEPLU untuk melakukan upaya tindak lanjut untuk memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja secara tidak resmi di Macau dan Malaysia serta negara tujuan lainnya.

DRAFT KESIMPULAN / KEPUTUSAN

Setelah mendengarkan berbagai usul/saran/tanggapan para Anggota Komisi IX DPR RI, maka sebelum rapat ditutup, Ketua Rapat menyampaikan dan membacakan beberapa kesimpulan yaitu :

11. Komisi IX DPR RI mendorong Direktorat Jenderal P2TKLN DEPNAKERTRANS, Direktorat Jenderal Imigrasi DEPKUMHAM, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional DEPLU dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler DEPLU untuk mengintensifkan kerja sama dan koordinasi dalam menangani permasalahan pengiriman TKI ke luar negeri.
12. Komisi IX DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi DEPKUMHAM dan Direktorat Jenderal P2TKLN DEPNAKERTRANS agar lebih selektif dalam meneliti dokumen identitas pembuatan pasport untuk mencegah pemalsuan dokumen jati diri CTKI, terutama mengenai umur.
13. Komisi IX DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi DEPKUMHAM dan Direktorat Jenderal P2TKLN DEPNAKERTRANS untuk meningkatkan upaya pemberantasan calo dan pemungutan biaya tidak resmi dalam proses pembuatan paspor bagi TKI.
14. Komisi IX DPR RI mendesak Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional DEPLU untuk meningkatkan program perlindungan TKI di seluruh negara penempatan dan mengkoordinasikan progress permasalahan hasil evaluasi TKI kepada Komisi IX DPR RI
15. Komisi IX DPR RI mendorong Dirjen P2TKLN DEPNAKERTRANS dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional DEPLU untuk melakukan upaya tindak lanjut untuk memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja secara tidak resmi di Macau dan Malaysia serta negara tujuan lainnya.

Rapat ditutup pukul 17.15 WIB

Jakarta, 30 Januari 2007

Pemerintah
Dirjen PPTKLN Depnakertrans RI,

Pimpinan Komisi IX DPR-RI
Ketua,

I Gusti Made Arke

Dr. Ribka Tjiptaning

Pemerintah
Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional
Deplu RI,

Pemerintah
Dirjen Imigrasi Depkumham RI,

Edi Pratomo

Drs. Basyir Ahmad Barmawi